

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember Tahun 2018

Jl. Empu Mandastana No. 10 Kel. Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah

Hulu Sungai Utara - Kalimantan Selatan 71418

Telp. 052761002 Fax. 052763037

e-mail : pa.amuntai@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2018

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Empu Mandastana No.10 Kel.Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah

Telp. 052761002 Fax. 052763037

Hulu Sungai Utara - Kalimantan Selatan 71418

e-mail : pa.amuntai@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Amuntai adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Amuntai mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Amuntai. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Hulu Sungai Utara, 31 Desember 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

SUAIFUDDIN.S.Ag
NIP.197307022000031003

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	15
II. Neraca	17
III. Laporan Operasional	20
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan	24
A. Penjelasan Umum	24
A.1. Dasar Hukum.....	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Amuntai.....	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	26
A.4. Basis Akuntansi	26
A.5. Dasar Pengukuran	27
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	27
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	35
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	35
B.2. Belanja.....	36
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	41
C.1. Aset Lancar.....	41
C.2. Aset Tetap	43
C.3. Aset Lainnya	47
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	48
C.6. Ekuitas	48
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	49
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	49

D.2.	Beban Pegawai	49
D.3.	Beban Persediaan	50
D.4.	Beban Barang dan Jasa	50
D.5.	Beban Pemeliharaan	51
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	52
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	52
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	53
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	53
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	54
D.11.	Beban Lain-lain.....	54
D.12.	Kegiatan Non Operasional	55
D.13.	Pos Luar Biasa	55
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	56
E.1.	Ekuitas Awal	56
E.2.	Surplus (defisit) LO	56
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset	56
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	56
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	57
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	57
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	57
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	58
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	58
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	58
E.3.	Ekuitas Akhir.....	59
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	59
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	59
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	59
	Laporan-laporan Pendukung.....	61
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	62

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan TA 2017	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca TA 2018 dan TA 2017	11
Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN TA 2018 dan TA 2017	35
Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBPN TA 2018 dan TA 2017.....	36
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018.....	36
Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018	37
Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan TA 2017	37
Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017	38
Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan TA 2017	39
Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017.....	40
Tabel 11 Rincian Aset Lancar TA 2018 dan TA 2017	41
Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	41
Tabel 13 Rincian Belanja Dibayar di Muka.....	42
Tabel 14 Rincian Persediaan TA 2018 dan TA 2017	42
Tabel 15 Rincian Aset Tetap.....	43
Tabel 16 Rincian Saldo Tanah	44
Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	47
Tabel 18 Rincian Aset Lainnya.....	47
Tabel 19. Rincian Kewajiban Jangka Pendek TA 2018 dan TA 2017	48
Tabel 20 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir TA 2018.....	63
Tabel 21 Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa	65

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Amuntai

Jl.Empu Mandastana No.10 Kel.Sungai Malang Kec. Amuntai Tengah Hulu Sungai Utara -
Kalimantan Selatan 71418

Telp. 052761002 Fax. 052763037 e-mail : pa.amuntai@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Amuntai yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Amuntai telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hulu Sungai Utara, 31 Desember 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

SUAIFUDDIN.S.Ag
NIP.197307022000031003

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Amuntai Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2018 s.d. 31 Desember 2018.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 7.769.639 atau mencapai 99.60 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 7.801.000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp. 7.769.639 atau mencapai 99.60 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp. 7.801.000.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018			TA 2016
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	7.801.000	7.769.639	99.60	33.592.858
Belanja Negara	7.013.705.000	7.012.506.606	99.98	7.208.108.535

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana TA 2018 dan TA 2017.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset TA 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 7.488.658.791 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 468.000; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 7.488.190.791; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 6.190.971 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 6.190.971 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 7.488.658.791 yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp. 7.482.467.820 dan Utang kepada pihak ketiga sebesar Rp. 6.190.971.

Ringkasan Neraca TA 2018 dan TA 2017 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 2 Ringkasan Neraca TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
	TA 2018	TA 2017	Rp	%
Aset				
Aset Lancar	468.000	449.100	18.900	4.20
Aset Tetap	7.488.190.791	5.252.383.479	2.235.807.312	42.56
Aset Lainnya	0	0	0	0.00
Jumlah Aset	7.488.658.791	5.252.832.579	2.235.826.212	42.56
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	6.190.971	14.394.822	(8.203.851)	(56.99)
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	6.190.971	14.394.822	(8.203.851)	(56.99)
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana	7.482.467.820	5.238.437.757	2.244.030.063	42.83
Utang kepada pihak ketiga	6.190.971	14.394.822	(8.203.851)	(56.99)
Jumlah Ekuitas Dana	7.488.658.791	5.252.832.579	2.235.826.212	42.56

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 4.169.445, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 7.311.114.273 sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai Rp. 7.306.944.828 Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp. 3.819.194 dan surplus(defisit) sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar Rp. 7.303.125.634.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp. 5.238.437.757 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar Rp. 7.303.125.634 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 2.542.418.730 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 7.004.736.967 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2018 adalah senilai Rp. 7.482.467.820.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2018, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TA 2018 DAN TA 2017 (dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2018			TA 2017
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	7.801.000	(7.769.639)	(99.60)	33.592.858
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		7.801.000	(7.769.639)	(99.60)	33.592.858
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	6.147.506.000	6.146.891.569	99.99	5.884.275.975
2.	Belanja Barang	B.2.2.	775.199.000	774.615.037	99.92	766.388.560
3.	Belanja Modal	B.2.3.	91.000.000	91.000.000	100.00	557.444.000
	Jumlah Belanja Negara		7.013.705.000	7.012.506.606	99.98	7.208.108.535

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI NERACA TA 2018 DAN TA 2017 (dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2018	TA 2018
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	0	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	468.000	449.100
Jumlah Aset Lancar		468.000	449.100
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	210.790.000	414.000.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2.508.007.982	2.417.007.982
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	6.927.898.000	5.239.176.500
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	5.643.998	5.643.998
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(2.164.149.189)	(2.823.445.001)
Jumlah Aset Tetap		7.488.190.791	5.252.383.479
Aset Lainnya	C.4		
Aset Lain-Lain	C.4. 1.	0	206.500.661
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 2.	0	(206.500.661)
Jumlah Aset Lainnya		0	0
Jumlah Aset		7.488.658791	5.252.832.579
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	6.190.971	14.394.822

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	6.190.971	14.394..822
Jumlah Kewajiban	6.190.971	14.394..822
EKUITAS		
Ekuitas Dana Lancar	C.6	
Jumlah Ekuitas Dana	7.482.467.820	5.238.437.757
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	7.488.668.791	5.252.832.579

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
LAPORAN OPERASIONAL
TA 2018 DAN TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2018	TA 2017
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	4.169.445	33.592.374
Jumlah Pendapatan			
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	6.132.942.947	5.885.138.087
Beban Persediaan	D. 3	33.336.100	53.203.450
Beban Barang dan Jasa	D. 4	382.819.431	365.110.722
Beban Pemeliharaan	D. 5	307.554.377	292.852.230
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	56.850.000	57.259.950
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	397.611.418	376.719.313
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		7.311.114.273	7.030.283.752
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(7.306.944.828)	(6.996.691.378)
Kegiatan Non Operasional			
	D. 12		
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		3.600.000	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		219.194	578.434
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		3.819.194	578.434

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	0	0
Pos Luar Biasa	D. 13	
Beban Luar Biasa	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(7.303.125.634)	(6.996.112.944)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TA 2018 DAN TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	TA 2018	TA 2017
Ekuitas Awal	E. 1	5.238.437.757	5.063.074.613
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(7.303.125.634)	(6.996.112.944)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas			
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	2.542.418.730	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	(3.039.589)
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	7.004.736.967	7.174.515.677
Kenaikan/Penurunan Ekuitas	E. 9	2.244.030.063	175.363.144
Ekuitas Akhir		7.482.467.820	5.238.437.757

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Amuntai

Visi Pengadilan Agama Amuntai adalah Terwujudnya Lembaga Pengadilan Agama Amuntai yang Agung.

Misi Pengadilan Agama Amuntai adalah.

1. Meningkatnya proses pengadilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Meningkatnya efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
5. Meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Amuntai melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya profesionalisme pelayanan aparaturnya yang netral, bersih dan berwibawa.
2. Terwujudnya rasa keadilan sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan serta memenuhi rasa keadilan masyarakat yang mandiri, independen dan kredibel.
3. Meningkatkan akses pelayanan dibidang peradilan pada masyarakat.
4. Meningkatkan kualitas input internal pada proses peradilan.
5. Terwujudnya koordinasi kinerja yang baik, baik itu koordinasi kinerja di bidang yudisial maupun koordinasi kinerja administrasi umum/ sekretariat pengadilan.
6. Terwujudnya efektifitas dan efisiensi koordinasi penyusunan program dan anggaran.
7. Terwujudnya efektifitas pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan kinerja.
8. Terwujudnya kualitas hubungan kerjasama antar instansi terkait.
9. Tersedianya sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan nyata organisasi

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis

kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Amuntai adalah sebagai berikut :

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang

tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp.7.769.639*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada TA 2018 adalah sebesar Rp. 7.769.639 atau mencapai 99.60 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 7.801.000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Amuntai adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.200.000	4.169.445	99.27
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0.00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	1000	194	19.40
4.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.600.000	3.600.000	100.00
Total Pendapatan		7.801.000	7.769.639	99.59

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 25.823.219 atau 76.88 persen dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan karena:

1. Munurunnya pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan;
2. Menurunnya penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu;
3. Tidak adanya penerimaan kembali persekot/uang muka gaji;

Perbandingan realisasi PNBP TA 2018 dan TA 2017 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	(4.169.445)	4.483.374	(313.929)	(7.00)
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	(0)	29.109.000	(29.109.000)	(100.00)
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	(194)	484	(290)	(59.91)
4.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	3.600.000	0	3.600.000	0,00
Total Pendapatan		7.769.639	33.592.858	25.823.219	76.88

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja Negara
:
Rp.7.012.506.606

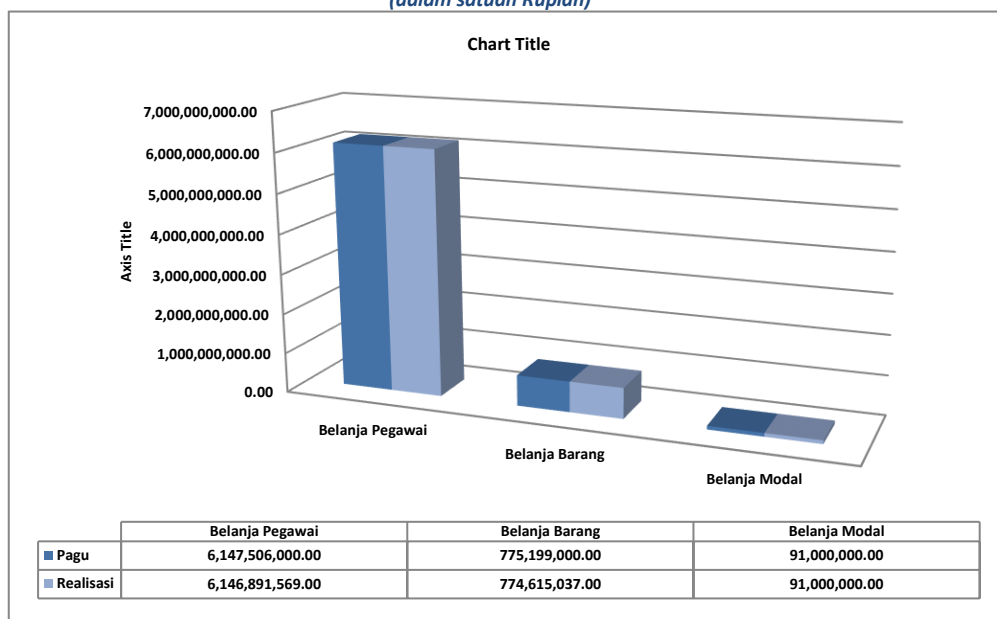
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Amuntai TA 2018 adalah sebesar Rp. 7.012.506.606 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 99.98 persen dari anggaran senilai Rp. 7.013.705.000 Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018		%
	Pagu	Realisasi	
Belanja Pegawai	6.147.506.000	6.146.891.809	99.99
Belanja Barang	775.199.000	774.615.037	99.92
Belanja Modal	91.000.000	91.000.000	100.00
Total Belanja Bruto	7.013.705.000	7.012.506.846	99.98
Pengembalian Belanja		(240)	0
Total Belanja Netto	7.013.705.000	7.012.506.606	99.98

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2018
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2018 & 2017

Realisasi Belanja Negara mengalami penurunan sebesar Rp. 259.916.394 atau sebesar 3.57 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Penurunan tersebut disebabkan karena :

1. Menurunnya anggaran untuk belanja modal;

Perbandingan realisasi belanja TA 2018 dan TA 2017 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	6.146.891.569	5.884.275.975	262.615.594	4.46
Belanja Barang	774.615.037	766.388.560	8.226.477	1.07
Belanja Modal	(91.000.000)	557.444.000	(466.444.000)	(83.68)
Total Belanja	7.012.506.606	7.208.108.535	(195.601.929)	(2.71)

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai :
Rp.6.146.891.56
9

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Amuntai TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 6.146.891.569 dan Rp. 5.884.275.975.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 262.615.594 atau 4.46 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Meningkatnya seluruh pos realisasi belanja pegawai, kecuali belanja tunjangan anak PNS, tunjangan beras PNS, tunjangan umum PNS, tunjangan kemahalan hakim;

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.922.173.000	1.872.607.720	49.565.280	2.64
Beban Pembulatan Gaji PNS	21.962	19.897	2.065	10.3
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	141.911.780	132.159.622	9.752.158	7.38
Beban Tunj. Anak PNS	(45.798.604)	46.770.950	(972.346)	(2.08)
Beban Tunj. Struktural PNS	35.860.000	33.800.000	2.060.000	6.09
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.985.630.000	2.820.915.000	164.715.000	5.83
Beban Tunj. PPh PNS	408.781.303	377.844.686	30.936.617	8.18
Beban Tunj. Beras PNS	(88.569.660)	92.045.820	(3.476.160)	3.77
Beban Uang Makan PNS	291.675.000	273.178.000	18.497.000	6.77
Beban Tunjangan Umum PNS	(7.770.000)	8.135.000	365.000	(4.48)
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	(218.700.000)	226.800.000	(8.100.000)	3.57
Beban Uang Lembur	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	6.146.891.809	5.884.276.695	262.615.114	4.46
Pengembalian Belanja	(240)	(720)	(480)	(66.6)
Total Belanja Netto	6.146.891.569	5.884.275.975	262.615.594	4.46

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja Barang
:*
Rp.774.615.037

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Amuntai TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 774.615.037 dan Rp. 766.388.560.

Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp. 8.226.477 atau 1.07 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Meningkatnya realisasi belanja barang operasional dan non operasional;
2. Meningkatnya realisasi belanja jasa;
3. Meningkatnya realisasi belanja pemeliharaan;

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	307.117.376	306.417.682	699.694	0.22
Belanja Barang Non Operasional	6.050.000	5.640.000	410.000	7.26
Belanja Jasa	63.907.284	51.694.698	12.212586	23.62
Belanja Pemeliharaan	300.790.377	283.871.230	16.919.147	5.96
Belanja Perjalanan Dinas	(56.850.000)	57.259.950	(409.950)	(0.71)
Belanja Barang Persediaan	(39.900.000)	61.505.000	(21.605.000)	(35.12)
Total Belanja Brutto	774.615.037	766.388.560	8.226.477	1.07
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	774.615.037	766.388.560	8.226.477	1.07

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja Modal :*
Rp.91.000.000

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Amuntai TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 91.000.000 dan Rp. 557.444.000.

Realisasi Belanja Modal TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 466.444.000 atau

83.68 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Menurunnya realisasi belanja modal peralatan dan mesin;
2. Tidak adanya anggaran belanja untuk belanja modal gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan dan lainnya

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	(91.000.000)	507.491.500	416.491.500	82.0
Belanja Modal Jalan, Irigasi, Jaringan	(0)	44.952.500	(44.952.500)	(100,00)
Belanja Modal Lainnya	(0)	5.000.000	(5.000.000)	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
Total Belanja Brutto	(91.000.000)	557.444.000	(416.491.500)	(82.0)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	(91.000.000)	557.444.000	(416.491.500)	(82.0)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar:
Rp.468.000

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 468.000 dan Rp. 449.100.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Amuntai TA 2018 dan TA 2017 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 11 Rincian Aset Lancar TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Belanja Dibayar di Muka	0	0
Persediaan	468.000	449.100
Total Aset Lancar	468.000	449.100

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp.0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember TA 2018 dan 31 Desember TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember TA 2018	31 Desember TA 2017
1.	Uang Persediaan	468.000	449.100
	Jumlah	468.000	449.100

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka: Rp.0*

Belanja Dibayar di Muka TA 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Tabel 13 Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	TA 2018	TA 2017
1.	Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	0	0
Jumlah		0	0

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp.468.000*

Persediaan TA 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 468.000 dan Rp. 449.100. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 14 Rincian Persediaan TA 2018 dan TA 2017

No.	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	Barang Konsumsi	468.000	449.100
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0

10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		468.000	449.100

C.2. Aset Tetap

Aset Tetap :
Rp.7.488.190.7
91

Nilai Aset Tetap TA 2018 dan TA 2017 tersaji sebesar Rp. 7.488.190.791 dan Rp. 5.252.383.479 Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan
1	Tanah	(210.790.000)	414.000.000	(203.210.000)
2	Peralatan dan Mesin	2.508.007.982	2.417.007.982	91.000.000
3	Gedung dan Bangunan	6.927.898.000	5.239.176.500	1.688.721.500
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	5.643.998	5.643.998	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
Jumlah		9.652.339.980	8.075.828.480	1.576.511.500
Akumulasi Penyusutan		2.164.149.189	2.823.445.001	659.295.812
Nilai Buku Aset Tetap		7.488.190.791	5.252.383.479	2.235.807.312

C.2.1. Tanah

Tanah:
Rp.210.790.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah TA 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 210.790.000 dan Rp. 414.000.000.

Rincian saldo tanah TA 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 16 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	1	197 m ²	54/Sungai Malang/2012	Mahkamah Agung	Gedung Kantor	210.790.000
Jumlah						210.790.000

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin :
Rp.2.508.007.982*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin TA 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.508.007.982 dan Rp. 2.417.007.982.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo TA 2017	2.417.007.982
Mutasi Tambah	91.000.000
Mutasi Kurang	0
Saldo TA 2018	2.508.007.982
Akumulasi Penyusutan TA 2018	(2.007.496.437)
Nilai Buku TA 2018	500.511.545

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin TA 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 2.508.007.982 dan Rp. 2.417.007.982. Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 91.000.000. Sedangkan perolehan Peralatan dan Mesin dari pembelian adalah sebesar Rp. 91.000.000.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp.
6.927.898.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan TA 2018 dan TA Desember 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.927.898.000 dan Rp. 5.239.176.500.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo TA 2017	5.239.176.500
Mutasi Tambah	1.688.721.500
Mutasi Kurang	0
Saldo TA 2018	6.927.898.000
Akumulasi Penyusutan TA 2018	156.652.752
Nilai Buku TA 2018	6.771.245.248

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan TA 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.927.898.000 dan Rp. 5.239.176.500.

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp.0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo TA 2017	0
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo TA 2018	0
Akumulasi Penyusutan TA 2018	0
Nilai Buku TA 2018	0

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya:
Rp.5.643.998*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya TA 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 5.643.998 dan Rp. 5.643.998.

Mutasi tambah aset tetap lainnya pada Tahun 2018 keseluruhannya Rp. 0.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo TA 2017	5.643.998
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo TA 2018	5.643.998
Akumulasi Penyusutan TA 2018	0
Nilai Buku TA 2018	5.643.998

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

*Konstruksi dalam
Pengerjaan :
Rp.0*

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan TA 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

*Akumulasi
Penyusutan Aset
tetap :
Rp.2.164.149.189*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing Rp. 2.164.149.189 dan Rp. 2.823.445.001.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan

(KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2018 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 17 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2.506.007.982	2.007.496.437	500.511.545
2	Gedung dan Bangunan	6.927.898.000	156.652.752	6.771.245.248
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	5.643.998	0	0
Jumlah		9.439.549.980	2.164.149.189	7.271.756.793

Aset Lainnya:
Rp.7.488.658.79

C.3. Aset Lainnya

1 Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya TA 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.488.658.791 dan Rp. 5.252.832.579 Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Tabel 18 Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	TA 2017
1	Aset tak Berwujud	0	0
2	Aset Lain-lain	0	206.500.661
3	Aset lainnya yang belum diregister	0	0
Nilai perolehan Aset Lainnya		0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0	(206.500.661)
Nilai buku Aset Lainnya		7.488.658.791	5.252.832.579

C.3.1. Aset Lain-lain

Aset Lain-lain :
Rp.0

Saldo aset lain-lain TA 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 206.500.661. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Amuntai

serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo TA 2017	206.500.661
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	(206.500.661)
Saldo TA 2018	0

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp.6.190.971*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek TA 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.190.971 dan Rp. 14.394.822. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. , sedangkan TA 2017 tercatat sebesar Rp. 14.394.822.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Amuntai TA 2018 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 19. Rincian Kewajiban Jangka Pendek TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Utang kepada Pihak Ketiga	6.190.971	14.394.822
Jumlah	6.190.971	14.394.822

C.4.1. Utang Kepada Pihak Ketiga

*Utang Kepada
Pihak Ketiga:
Rp.6.190.971*

Utang kepada Pihak Ketiga TA 2018 dan TA 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.190.971 dan Rp. 14.394.822. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayarkan, berupa pembayaran rekening air, listrik, telepon, speedy/internet bulan Desember 2018.

C.5. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp.7.482.467.820*

Ekuitas TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.482.467.820 dan Rp. 5.267.546.757. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNBp : Rp.4.169.445 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 4.169.445 dan Rp. 33.592.374. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBp TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	4.200.000	4.169.445	99.27
2.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0.00
3.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		0	0.00
4.	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya		0	0.00
Total Pendapatan		4.200.000	4.169.445	99.27

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp.6.132.942.947 Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 6.132.942.947 dan Rp. 5.856.029.087. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 37 Rincian Beban Pegawai TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	1.921.639.800	1.874.174.780	47.465.020	2.53
Beban Pembulatan Gaji PNS	21.722	19.199	2.523	13.14
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	141.858.410	132.353.108	9.505.302	7.18

Beban Tunj. Anak PNS	45.777.256	46.792.298	(1.015.042)	(2.16)
Beban Tunj. Struktural PNS	35.860.000	33.800.000	2.060.000	6.09
Beban Tunj. Fungsional PNS	2.982.630.000	2.819.915.000	162.715.000	5.77
Beban Tunj. PPh PNS	408.240.099	377.785.882	30.454.217	8.06
Beban Tunj. Beras PNS	88.569.660	92.045.820	(3.476.160)	(3.77)
Beban Uang Makan PNS	281.876.000	273.317.000	8.559.000	3.13
Beban Tunjangan Umum PNS	7.770.000	8.135.000	(365.000)	(4.48)
Beban Tunjangan Kemahalan Hakim	218.700.000	226.800.000	(8.100.000)	(3.57)
Beban Uang Lembur	0	0	0	0.00
Total Beban Pegawai	6.132.942.947	5.885.138.087	(8.100.000)	31.90

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp.33.336.100

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 33.336.100 dan Rp. 53.203.450. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	33.336.100	53.203.450	(19.867.350)	(37.34)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	33.336.100	53.203.450	(19.867.350)	(37.34)

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa : Rp.382.819.431

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 382.819.431 dan Rp. 365.110.722. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 39 Rincian Beban Jasa TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Langganan Keperluan Perkantoran	243.280.676	238.145.320	5.135.356	2.15
Beban Jasa Pos dan Giro	1.168.700	1.199.862	(31.162)	(2.59)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	45.600.000	45.600.000	0	0.00
Beban Barang Operasional Lainnya	18.600.000	25.375.000	(6.775.000)	26.69
Beban Bahan	6.050.000	5.640.000	410.000	7.26
Beban Barang Non Operasional Lainnya	0	0	0	0.00
Beban Langganan Listrik	61.420.069	39.225.484	22.194.585	56.58
Beban Langganan Telepon	1.140.186	2.376.856	(1.236.670)	(52.02)
Beban Langganan Air	5.559.800	7.548.200	(1.988.400)	(26.34)
Total Beban Jasa	382.819.431	365.110.722	(1.988.400)	(41.66)

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp.307.554.377*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 307.554.377 dan Rp. 292.852.230. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	147.900.000	141.125.000	6.775.000	4.80
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	136.290.377	126.951.230	9.339.147	7.35
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	16.600.000	12.000.000	4.600.000	38.33
Beban Pemeliharaan Jaringan	0	3.795.000	(3.795.000)	(100.00)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	6.764.000	8.981.000	(2.217.000)	(24.68)

Total Beban Pemeliharaan	307.554.377	292.852.230	(2.217.000)	(74.19)
--------------------------	-------------	-------------	-------------	---------

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp.56.850.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 56.850.000 dan Rp. 57.259.950. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	56.850.000	57.259.950	(409.950)	(0.71)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	0	0	0	0
Total Beban Perjalanan Dinas	56.850.000	57.259.950	(409.950)	(0.71)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp.0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 42 Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin	0	0	0	0

untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda				
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp.0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 43 Rincian Beban Bantuan Sosial TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp.397.611.418

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan per TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 397.611.418 dan Rp. 376.719.313. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	240.958.666	285.639.381	(44.680.715)	(15.64)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	156.652.752	90.479.932	66.172.820	73.13
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	600.000	(600.000)	(100.00)
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	397.611.418	376.719.313	(600.000)	(42.50)

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp.0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 45 Rincian Beban Piutang tak Tertagih
TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp.0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja

Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 46 Rincian Beban Lain-lain
TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Peralatan dan Mesin				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel Aset	0	0	0	0
Tetap Lainnya				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp.3.819.194

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Surplus/(defisit) Pelepasan Aset	3.600.000	0	3.600.000	0.00
Non Lancar				
Surplus/(defisit) Penyelesaian	0	0	0	0
Kewajiban Jangka Panjang				
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan	219.194	578.434	(359.240)	(62.10)
Non Operasional Lainnya				
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	3.819.194	578.434	3.240.760	172.96

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar
Biasa : Rp.0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 48 Rincian Pos Luar Biasa
TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 5.238.437.757 dan Rp. 5.063.074.613.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 7.303.125.634 dan Rp. 6.967.003.944. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 Dan Rp. 0 Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada TA 2018 adalah sebagai berikut :

**Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
TA 2018**
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 2.542.418.730 dan Rp. 0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 3.039.589. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

**Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
TA 2018**
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.004.736.967 dan Rp. 7.174.515.677. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
TA 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(7.769.639)
Ditagihkan ke Entitas Lain	7.012.506.606
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	7.004.736.967

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode TA 2018, DDEL sebesar Rp. 7.769.639 sedangkan DKEL sebesar Rp. 7.012.506.606.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan TA 2018, sebesar Rp. 0. dari total. 0. yang diterima sepanjang tahun 2018.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan TA 2018 adalah Rp. 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	
2	ABC	Barang	

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada TA 2018 dan TA 2017 adalah masing-masing sebesar Rp. 7.482.467.820 dan Rp. 5.238.437.757.

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan BPK terhadap Laporan Keuangan semester ini maupun pada Laporan Keuangan tahun lalu.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Informasi Pendapatan dan Belanja secara akrual dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Terdapat belanja pegawai yang masih harus dibayar yaitu kekurangan gaji hakim bulan Oktober sampai Desember 2017 dan sisa uang makan bulan Desember 2017, yang seharusnya dibayarkan namun baru dapat dibayarkan di tahun 2018.
2. Terdapat belanja pegawai dibayar dimuka (prepaid), untuk 3 orang pegawai yang telah dibayar (lunas), tetapi tetap harus di akrual kan.
3. Terdapat belanja barang yang masih harus dibayar yaitu pembayaran langganan Listrik, Telepon, Speedy/Internet dan Air (PDAM) bulan Desember 2018, yang seharusnya dibayarkan namun baru dapat dibayarkan di Tahun Anggaran 2019.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Amuntai adalah :

1. BANK BRI CABANG AMUNTAI A/C 0147.01.000078.30.8 a.n. BPG 151 PENGADILAN AGAMA KELAS 1B AMUNTAI yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 0,-

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Revisi akun istemasi penerimaan dan halaman III Dipa tanggal 17 Oktober 2018;
2. Revisi rencana penarikan dana dan penerimaan halaman III Dipa tanggal 19 Nopember 2018;
3. Revisi rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan tanggal 30 Nopember 2019;
4. Revisi pagu minus tanggal 08 Februari 2019

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Terdapat terdapat Informasi mengenai Ralat SPM No. 01, 02, 04, 07, 12, 18, 23 kerana kesalahan akun pendapatan dari akun 423141 menjadi 425131.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Tidak ada catatan penting lainnya.

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Amuntai
Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2017

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2016	2017	Per 31 Desember 2017	Per 31 Desember 2017
A. Peralatan dan Mesin							
1	Alat Bantu	-	199.765.500	9.975.000	28.537.928	(9.975.000)	171.227.572
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	-	603.059.919	510.496.345	65.447.145	0	27.116.429
3	Alat Kantor	-	272.647.000	148.900.200	35.459.800	154.000	88.133.000
4	Alat Rumah Tangga	-	673.857.893	417.195.516	70.019.119	0	185.543.258
5	Alat Studio	-	34.823.000	5.365.000	6.364.600	0	23.093.400
6	Alat Komunikasi	-	5.544.000	5.544.000	0	0	0
7	Alat Kedokteran	-	2.145.000	429.000	429.000	0	1.287.000
8	Unit Alat Laboratorium	-	0	96.250	0	(96.250)	0
9	Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	-	0	1.084.305	0	(1.084.305)	0
10	Komputer Unit	-	431.089.670	281.515.672	48.705.288	0	100.868.710
11	Peralatan Komputer	-	195.176.000	107.232.513	30.676.501	4.066.144	53.200.842
12	Alat Kerja Penerbangan	-	-	-	-	-	-
B. Gedung dan Bangunan							
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	4.502.960.000	770.470.376	75.744.638	0	3.656.744.986
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	427.639.500	149.670.372	8.563.754	0	269.405.374

3	Tugu/tanda Batas	-	308.577.000	46.286.550	6.171.540	0	256.118.910
C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
D.	Aset Tetap Lainnya						
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	-	-	-	-	-
2	Kartografi, Naskah Dan Lukisan	-	-	-	-	-	-
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan						
1	Alat Bantu	-	9.975.000	-	-	9.975.000	-
2	Alat Kantor	-	28.450.000	28.450.000	0	0	0
3	Alat Rumah Tangga	-	75.443.661	74.843.661	600.000	0	0
4	Alat Studio	-	5.000.000	5.000.000	0	0	0
5	Alat Komunikasi	-	11.850.000	11.850.000	0	0	0
6	Komputer Unit	-	66.180.000	66.180.000	0	0	0
7	Peralatan Komputer	-	10.152.000	10.152.000	0	0	0
8	Bangunan Gedung Tempat Kerja	-	-	-	-	-	-
9	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	-	-	-	-	-	-
10	Instalasi Lain	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap						
	Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya						

Pengadilan Agama Amuntai
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2017

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
-	-	U	0	0	0	Nilai	Keterangan
			Jumlah :	0	0	0	0

Halaman ini bukan bagian dari laporan keuangan.

Silahkan ganti halaman ini dengan laporan realisasi belanja akrual (dari menu neraca akrual aplikasi komdanas)



Catatan atas Laporan
Keuangan
005
01
1500
402556

LAPORAN KEUANGAN PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI TAHUN 2017

{halaman ini untuk cover di samping/punggung saat dijilid}

DRAFT